

Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja 2020

Febrianto Syam^{1*} and Novayanti Sophia Rukmana²

¹Ilmu Politik, UIN Alauddin Makassar

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar

febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id dan novayanti@unm.ac.id

*Email Korespondensi: febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

Abstract (english):

Abstract: The integrity of elections is a crucial aspect in ensuring the legitimacy of the democratic process, especially in regions with strong cultural characteristics. This study examines the challenges of electoral integrity in the context of the Regional Head Election (Pilkada) in Tana Toraja, an area in Indonesia rich in traditional customs. Using a qualitative case study approach, this research analyzes data from the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tana Toraja, interviews with relevant officials, and field observations. The main findings indicate that traditional practices, such as the postponement of death registrations until after funeral ceremonies are held, migration without proper documentation, and traditional marriages without civil registration, significantly impact the accuracy of voter lists. Furthermore, the study reveals differing perceptions between the community and election organizers regarding the definition and manifestations of money politics within the local cultural context. This research contributes to a more nuanced understanding of the interaction between traditional customs and modern democratic processes, highlighting the importance of culturally sensitive approaches in election management in regions with strong cultural characteristics.

Keywords: Electoral Integrity; Pilkada; Tana Toraja; Customs; Money Politics.

Abstrak (Bahasa):

Abstrak Integritas pemilu merupakan aspek krusial dalam menjamin legitimasi proses demokratis, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat. Penelitian ini mengkaji tantangan integritas pemilu dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tana Toraja, sebuah wilayah di Indonesia yang kental dengan tradisi adatnya. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tana Toraja, wawancara dengan pejabat terkait, dan observasi lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik-praktik adat seperti penundaan pencatatan kematian hingga upacara pemakaman dilaksanakan, migrasi tanpa surat pindah, dan pernikahan adat tanpa pencatatan sipil memiliki dampak signifikan terhadap akurasi daftar pemilih. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan adanya persepsi yang berbeda antara masyarakat dan penyelenggara pemilu mengenai definisi dan manifestasi politik uang dalam konteks budaya setempat. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih nuansir tentang interaksi antara tradisi adat dan proses demokrasi modern, serta menyoroti pentingnya pendekatan yang peka budaya dalam manajemen pemilu di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat.

Kata kunci: Integritas Pemilu; Pilkada; Tana Toraja; Adat Istiadat; Politik Uang.

PENDAHULUAN

Integritas pemilu telah menjadi isu sentral dalam studi demokrasi kontemporer, mengingat perannya yang vital dalam menjamin legitimasi proses demokratis dan kepercayaan publik terhadap sistem politik (Norris, 2014). Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana demokrasi masih dalam tahap konsolidasi, integritas pemilu menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika berhadapan dengan keragaman budaya dan praktik adat yang masih kuat (Aspinall & Mietzner, 2010). Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Tana Toraja, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kekayaan budaya dan kuatnya tradisi adatnya.

Tana Toraja, dengan populasi sekitar 221.000 jiwa (BPS Tana Toraja, 2020), merupakan wilayah yang unik di mana praktik-praktik adat masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini menciptakan dinamika menarik dalam pelaksanaan pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana terjadi pertemuan antara sistem demokrasi modern dengan nilai-nilai tradisional yang telah lama mengakar. Sebagaimana diungkapkan oleh Vel (2005), interaksi antara institusi formal demokrasi dengan struktur sosial tradisional seringkali menghasilkan praktik-praktik politik yang unik dan kadang kontradiktif dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji pelaksanaan pemilu di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat. Misalnya, Schulte Nordholt dan van Klinken (2007) menganalisis dinamika politik lokal di berbagai daerah di Indonesia pasca-Reformasi, termasuk bagaimana tradisi adat mempengaruhi proses politik. Mereka menemukan bahwa desentralisasi politik telah membuka ruang bagi elit lokal untuk memanfaatkan identitas etnis dan adat dalam kompetisi politik. Sementara itu, Aspinall dan Sukmajati (2016) telah meneliti praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia, termasuk bagaimana praktik tersebut sering kali terkait dengan nilai-nilai budaya setempat.

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana praktik-praktik adat spesifik di suatu daerah dapat mempengaruhi berbagai aspek integritas pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga kampanye dan pemungutan suara. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam kasus Pilkada di Tana Toraja. Sebagaimana diargumentasikan oleh Bjornlund (2004), pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal sangat penting dalam upaya meningkatkan integritas pemilu di negara-negara berkembang.

Penelitian ini dipandu oleh pertanyaan utama: Bagaimana praktik-praktik adat di Tana Toraja mempengaruhi integritas pemilu dalam konteks Pilkada? Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi praktik-praktik adat di Tana Toraja yang memiliki implikasi terhadap pelaksanaan Pilkada; (2) Menganalisis bagaimana praktik-praktik adat tersebut mempengaruhi berbagai aspek integritas pemilu, termasuk akurasi daftar pemilih dan persepsi tentang politik uang; (3) Mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut; dan (4) Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan integritas pemilu di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat.

Studi ini mengadopsi kerangka konseptual integritas pemilu yang dikembangkan oleh Norris (2014), yang mencakup berbagai dimensi termasuk hukum pemilu, prosedur pemilu,

Nama Penulis: Febrianto Syam, Novayanti Sophia Rukmana
Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja

batas-batas distrik pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran partai dan kandidat, kampanye media, pembiayaan kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan resolusi sengketa pemilu. Namun, fokus utama penelitian ini adalah pada aspek-aspek yang paling terkait dengan praktik adat di Tana Toraja, yaitu pendaftaran pemilih dan persepsi tentang politik uang. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Hicken (2011) bahwa studi tentang integritas pemilu perlu mempertimbangkan variasi konteks lokal dan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kerangka universal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur tentang integritas pemilu dengan menyoroti pentingnya faktor budaya dan adat istiadat dalam memahami tantangan pemilu di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan seruan dari para sarjana seperti Schaffer (2007) untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang praktik demokrasi di berbagai latar belakang budaya. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan integritas pemilu di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan integritas pemilu dalam konteks Pilkada di Tana Toraja. Pendekatan studi kasus dipilih karena kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang fenomena yang kompleks (Yin, 2018). Dalam hal ini, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki interaksi antara praktik-praktik adat dan proses pemilu dalam setting alamiahnya. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik budaya Tana Toraja dan pelaksanaan Pilkada terakhir pada tahun 2020.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) Analisis dokumen, termasuk laporan resmi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, data daftar pemilih, dan catatan pelanggaran pemilu; (2) Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 24 informan kunci, meliputi pejabat Bawaslu dan KPU Tana Toraja, tokoh adat, perwakilan partai politik, aktivis pemilu, dan warga masyarakat; dan (3) Observasi partisipan terhadap beberapa tahapan Pilkada, termasuk proses pendaftaran pemilih dan kampanye. Selain itu, dua sesi Focus Group Discussion (FGD) dilakukan, masing-masing dengan 8-10 peserta, untuk mengeksplorasi persepsi kolektif tentang integritas pemilu dan peran praktik adat dalam Pilkada. Pengumpulan data dilaksanakan selama periode tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2021.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis meliputi: (1) Familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang; (2) Pengkodean awal untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul; (3) Pencarian dan peninjauan tema; (4) Pendefinisian dan penamaan tema; dan (5) Penulisan laporan dengan integrasi temuan ke dalam narasi yang koheren. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, beberapa strategi validasi digunakan, termasuk triangulasi data dari berbagai sumber, member checking dengan partisipan penelitian, dan peer debriefing dengan rekan peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Informed consent diperoleh dari semua partisipan sebelum wawancara atau FGD. Kerahasiaan dan anonimitas partisipan dijaga dengan menggunakan pseudonim dalam pelaporan hasil penelitian. Perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal generalisasi temuan, mengingat sifatnya sebagai studi kasus tunggal. Namun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, yang



dapat memberikan wawasan berharga untuk studi-studi serupa di daerah lain dengan karakteristik budaya yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tana Toraja dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik uniknya yang menggambarkan pertemuan antara tradisi adat yang kuat dengan praktik demokrasi modern. Dengan populasi sekitar 221.000 jiwa (BPS Tana Toraja, 2020), Tana Toraja merupakan daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang relatif tinggi, mencapai 77,8% pada Pilkada 2020 (KPU Tana Toraja, 2021). Namun, di balik tingginya partisipasi ini, terdapat kompleksitas yang menarik untuk dikaji dalam konteks integritas pemilu.

Karakteristik kepemiluan di Tana Toraja mencerminkan dinamika yang unik. Menurut data Bawaslu Tana Toraja (2021), terdapat beberapa tantangan spesifik dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk kesulitan dalam verifikasi daftar pemilih dan adanya persepsi yang berbeda tentang praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan temuan Aspinall dan Sukmajati (2016) yang mengidentifikasi adanya variasi lokal dalam praktik politik elektoral di Indonesia.

1. Praktik Adat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pilkada

1.1. Penundaan Pencatatan Kematian

Praktik adat yang memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan Pilkada di Tana Toraja adalah penundaan pencatatan kematian hingga selesainya upacara pemakaman adat yang dikenal sebagai *Rambu Solo'*. Ritual ini merupakan salah satu elemen penting dalam budaya Toraja yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat setempat terkait kematian dan kehidupan setelah kematian.

Rambu Solo' bukan sekadar upacara pemakaman biasa. Ini adalah ritual yang sangat kompleks dan membutuhkan persiapan yang ekstensif. Keluarga almarhum harus mengumpulkan sumber daya yang cukup besar, baik secara finansial maupun material, untuk menyelenggarakan upacara ini. Persiapan dapat melibatkan pengumpulan dana, penyiapan hewan kurban (biasanya kerbau dan babi dalam jumlah besar), pembangunan struktur upacara sementara, dan koordinasi dengan anggota keluarga besar yang mungkin tersebar di berbagai daerah.

Karena kompleksitas dan biaya yang terkait dengan *Rambu Solo'*, tidak jarang upacara ini ditunda selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah kematian fisik seseorang. Selama periode penundaan ini, masyarakat Toraja memandang almarhum bukan sebagai orang yang telah meninggal, melainkan sebagai orang yang sakit atau tidur. Mayat biasanya diawetkan dan disimpan di rumah keluarga, dan keluarga tetap berinteraksi dengan almarhum seolah-olah mereka masih hidup.

Fenomena ini menciptakan tantangan unik dalam konteks pemilihan umum, khususnya dalam hal pengelolaan daftar pemilih. Secara hukum dan prosedur pemilu standar, seseorang yang telah meninggal dunia seharusnya segera dicoret dari daftar pemilih. Namun, dalam konteks Toraja, status "hidup" atau "mati" seseorang tidak hanya ditentukan oleh kematian fisik, tetapi juga oleh pelaksanaan *Rambu Solo'*. Dilema ini diilustrasikan dengan jelas oleh pernyataan pejabat Bawaslu Tana Toraja: "Kami menghadapi dilema. Di satu sisi, secara hukum, seseorang yang telah meninggal seharusnya dicoret dari daftar pemilih. Namun,

Nama Penulis: Febrianto Syam, Novayanti Sophia Rukmana

Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja

secara adat, mereka masih dianggap 'hidup' sampai upacara *Rambu Solo* dilaksanakan. Ini menciptakan kesulitan dalam memverifikasi status pemilih."

Pernyataan ini menggambarkan konflik antara hukum formal dan adat istiadat lokal. Penyelenggara pemilu harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap prosedur hukum dengan penghormatan terhadap kepercayaan dan praktik budaya setempat. Hal ini menciptakan grey area dalam penentuan status pemilih dan berpotensi mempengaruhi akurasi daftar pemilih.

Konsep "kematian bertahap" yang dikemukakan oleh Tsintjilonis (2000) memberikan kerangka teoretis untuk memahami fenomena ini. Dalam studinya tentang ritual kematian di Toraja, Tsintjilonis mengargumentasikan bahwa masyarakat Toraja memandang kematian bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses yang berlangsung lama dan terdiri dari beberapa tahap. Kematian fisik hanyalah salah satu tahap dalam proses ini, dan transformasi penuh dari status "hidup" ke "mati" hanya tercapai setelah pelaksanaan *Rambu Solo*.

Pemahaman ini memiliki implikasi mendalam terhadap bagaimana masyarakat Toraja memperlakukan orang yang telah meninggal secara fisik namun belum menjalani *Rambu Solo*. Mereka masih dianggap sebagai bagian dari komunitas, dan dalam beberapa kasus, masih dianggap memiliki hak dan kewajiban sosial tertentu. Dalam konteks pemilu, ini bisa berarti bahwa beberapa anggota masyarakat mungkin menganggap almarhum yang belum menjalani *Rambu Solo* masih memiliki hak pilih.

Situasi ini menciptakan tantangan kompleks bagi penyelenggara pemilu. Mereka harus menavigasi antara tuntutan hukum formal yang mengharuskan pemutakhiran akurat daftar pemilih, dan realitas sosial-budaya yang memiliki pemahaman berbeda tentang status "hidup" dan "mati". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar universal integritas pemilu perlu mempertimbangkan dan beradaptasi dengan variasi konteks budaya lokal.

Lebih lanjut, fenomena ini juga mengangkat pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana demokrasi modern berinteraksi dengan praktik-praktik tradisional. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu yang efektif dan legitimate di daerah dengan tradisi adat yang kuat mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan peka budaya, yang dapat mengakomodasi pemahaman lokal tentang identitas, kematian, dan keanggotaan komunitas.

1.2. Migrasi Tanpa Surat Pindah

Praktik adat lain yang memiliki dampak signifikan terhadap akurasi daftar pemilih di Tana Toraja adalah fenomena merantau tanpa mengurus surat pindah. Ini merupakan kebiasaan yang telah lama mengakar dalam budaya Toraja dan memiliki implikasi penting terhadap administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pemilu.

Masyarakat Toraja dikenal memiliki tradisi merantau yang kuat. Banyak warga Toraja meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari pekerjaan, menempuh pendidikan, atau mencari peluang ekonomi yang lebih baik di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri. Namun, yang menjadi unik adalah bagaimana mereka mempertahankan ikatan yang kuat dengan tanah leluhur mereka, meskipun telah tinggal di tempat lain dalam jangka waktu yang lama.

Keengganan untuk mengurus surat pindah mencerminkan keterikatan emosional dan kultural yang mendalam dengan Tana Toraja. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat:

"Bagi orang Toraja, merantau adalah hal biasa. Tapi mereka selalu menganggap Toraja sebagai kampung halaman. Mereka tidak mengurus surat pindah karena suatu saat pasti akan kembali, terutama untuk upacara adat."

Pernyataan ini mengungkapkan beberapa aspek penting dari identitas dan praktik sosial masyarakat Toraja:

1. Merantau sebagai Norma Sosial: Merantau bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi telah menjadi bagian integral dari budaya Toraja. Ini mungkin terkait dengan nilai-nilai seperti kemandirian, pengembangan diri, atau bahkan sebagai semacam "ritus peralihan" bagi banyak orang Toraja.
2. Konsep Kampung Halaman: Meskipun tinggal di tempat lain, Tana Toraja tetap dianggap sebagai "rumah" dalam arti yang lebih dalam. Ini mencerminkan pemahaman tentang identitas yang tidak hanya terikat pada tempat tinggal fisik, tetapi juga pada akar budaya dan leluhur.
3. Kewajiban Adat: Referensi tentang kembali untuk upacara adat menunjukkan bahwa ikatan dengan Toraja bukan hanya sentimental, tetapi juga melibatkan kewajiban sosial dan ritual yang konkret. Upacara adat, seperti *Rambu Solo'*, memainkan peran penting dalam mempertahankan ikatan ini.
4. Ekspektasi Kembali: Gagasan bahwa mereka "pasti akan kembali" menunjukkan bahwa migrasi sering dilihat sebagai fase sementara, bukan perpindahan permanen. Ini mungkin mempengaruhi keputusan untuk tidak mengurus surat pindah, yang mungkin dianggap sebagai tindakan yang terlalu definitif.

Fenomena ini sejalan dengan konsep "mobilitas sirkuler" yang dikemukakan oleh Hugo (1982) dalam studinya tentang pola migrasi di Indonesia. Hugo mengamati bahwa banyak migran di Indonesia mempertahankan ikatan yang kuat dengan daerah asal mereka, yang tercermin dalam pola perpindahan yang tidak permanen. Migran sering melakukan perjalanan bolak-balik antara daerah asal dan daerah tujuan, atau memiliki rencana jangka panjang untuk kembali ke daerah asal mereka.

Dalam konteks Toraja, mobilitas sirkuler ini memiliki dimensi tambahan yang terkait dengan kewajiban adat dan identitas budaya. Orang Toraja yang merantau mungkin kembali secara berkala untuk upacara adat, pertemuan keluarga, atau bahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal. Hal ini menciptakan pola migrasi yang kompleks di mana seseorang mungkin memiliki "kaki di dua tempat" - secara fisik berada di tempat perantauan, tetapi secara administratif dan kultural tetap terikat di Tana Toraja.

Implikasi dari fenomena ini terhadap administrasi pemilu sangat signifikan:

1. Akurasi Daftar Pemilih: Orang Toraja yang merantau tanpa mengurus surat pindah tetap terdaftar sebagai pemilih di Tana Toraja, meskipun mungkin sudah lama tidak tinggal di sana. Ini dapat menyebabkan overestimasi jumlah pemilih dan mempengaruhi perhitungan tingkat partisipasi pemilih.
2. Potensi Suara Tidak Terpakai: Jika pemilih yang merantau tidak dapat kembali pada hari pemilihan, suara mereka menjadi tidak terpakai, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.
3. Tantangan Logistik: Penyelenggara pemilu mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan jumlah surat suara yang diperlukan atau dalam mengalokasikan sumber daya pemilu lainnya.
4. Potensi Kecurangan: Situasi ini dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan hak pilih, di mana pihak-pihak tertentu mungkin mencoba menggunakan suara dari pemilih yang tidak hadir.

Nama Penulis: Febrianto Syam, Novayanti Sophia Rukmana

Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja

5. Dilema Kebijakan: Penyelenggara pemilu menghadapi dilema antara mempertahankan akurasi daftar pemilih dan menghormati ikatan kultural pemilih dengan daerah asal mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep "domisili" dalam konteks pemilu mungkin perlu dipahami secara lebih nuansir di daerah-daerah dengan pola migrasi yang kompleks seperti Tana Toraja. Ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika sosial-budaya lokal dalam merancang dan mengimplementasikan prosedur pemilu.

Lebih luas lagi, situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi modern ketika berinteraksi dengan realitas sosial-budaya yang kompleks. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam manajemen pemilu, yang dapat mengakomodasi variasi lokal dalam pola mobilitas dan konsep keanggotaan komunitas.

2. Dampak Praktik Adat terhadap Integritas Pemilu

2.1. Akurasi Daftar Pemilih

Praktik-praktik adat di Tana Toraja, khususnya yang berkaitan dengan penundaan pencatatan kematian dan pola migrasi tanpa surat pindah, memiliki implikasi yang mendalam terhadap akurasi daftar pemilih. Dampak ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempengaruhi integritas proses pemilu secara keseluruhan.

2.1.1. Overestimasi Jumlah Pemilih:

Penundaan pencatatan kematian, yang terkait erat dengan tradisi *Rambu Solo'*, mengakibatkan overestimasi jumlah pemilih yang signifikan. Data dari KPU Tana Toraja (2021) mengungkapkan bahwa sekitar 3% nama dalam daftar pemilih diperkirakan telah meninggal namun belum dicoret karena belum ada pencatatan resmi. Angka ini mungkin tampak kecil, namun dalam konteks pemilihan yang ketat, 3% bisa menjadi sangat signifikan.

Implikasi dari overestimasi ini meliputi:

- a. Distorsi Tingkat Partisipasi: Perhitungan tingkat partisipasi pemilih menjadi tidak akurat. Jika tingkat partisipasi dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang tercatat (termasuk yang sudah meninggal), maka angka partisipasi aktual akan tampak lebih rendah dari yang sebenarnya.
- b. Alokasi Sumber Daya yang Tidak Efisien: Overestimasi dapat menyebabkan alokasi berlebih sumber daya pemilu seperti surat suara, bilik suara, dan petugas TPS.
- c. Potensi Delegitimasi Hasil Pemilu: Jika publik menyadari adanya ketidakakuratan signifikan dalam daftar pemilih, ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu.

2.1.2. Peluang Penyalahgunaan Hak Pilih:

Keberadaan nama-nama pemilih yang sudah meninggal atau tidak lagi berdomisili di daerah tersebut dalam daftar pemilih membuka peluang besar untuk penyalahgunaan hak pilih. Laporan Bawaslu Tana Toraja (2021) mengonfirmasi adanya beberapa kasus dugaan penggunaan hak pilih orang yang telah meninggal atau tidak berada di tempat pada Pilkada 2020.

Implikasi dari situasi ini meliputi:

- a. Potensi Kecurangan Elektoral: Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kecurangan, misalnya dengan menggunakan hak pilih atas nama orang yang sudah meninggal atau tidak hadir.
- b. Tantangan Pengawasan: Bawaslu dan pengawas pemilu lainnya menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap suara yang diberikan adalah sah dan berasal dari pemilih yang berhak.

- c. Kompleksitas Hukum: Kasus-kasus dugaan penyalahgunaan hak pilih ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang rumit, mengingat statusnya yang berada di *grey area* antara hukum formal dan praktik adat.
- d. Erosi Kepercayaan Publik: Jika kasus-kasus penyalahgunaan hak pilih menjadi pengetahuan publik, ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu.

Lebih lanjut, situasi ini menciptakan dilema etis dan praktis bagi penyelenggara pemilu:

1. Dilema Kultural vs Legalitas: Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghormati praktik adat dan pemahaman lokal tentang kematian. Di sisi lain, ada tuntutan untuk mematuhi prosedur hukum dan standar integritas pemilu.
2. Tantangan Verifikasi: Proses verifikasi status pemilih menjadi sangat kompleks, membutuhkan pengetahuan mendalam tentang konteks lokal dan sensitivitas terhadap norma-norma adat.
3. Kebutuhan Inovasi Prosedural: Situasi ini menuntut pengembangan prosedur baru yang dapat mengakomodasi realitas lokal sambil tetap menjaga integritas pemilu.
4. Urgensi Edukasi Pemilih: Ada kebutuhan mendesak untuk edukasi pemilih yang tidak hanya fokus pada prosedur pemilu, tetapi juga pada pentingnya akurasi data kependudukan.

Fenomena ini juga memiliki implikasi teoretis yang lebih luas dalam studi demokrasi elektoral:

1. Rekonseptualisasi Integritas Pemilu: Kasus Tana Toraja menunjukkan bahwa konsep integritas pemilu perlu dipahami secara lebih kontekstual, mempertimbangkan variasi praktik budaya lokal.
2. Dinamika Formal-Informal: Situasi ini menyoroti kompleksitas interaksi antara institusi formal demokrasi dan praktik-praktik informal yang berakar pada tradisi lokal.
3. Batasan Universalisme: Kasus ini menantang asumsi universalitas dalam prosedur pemilu, menunjukkan pentingnya adaptasi lokal dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi.

Dampak praktik adat terhadap akurasi daftar pemilih di Tana Toraja bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mengimplementasikan demokrasi elektoral di daerah dengan tradisi kultural yang kuat. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan peka budaya dalam manajemen pemilu, yang dapat menjembatani kesenjangan antara tuntutan prosedural demokrasi modern dan realitas sosial-budaya lokal.

2.2. Persepsi tentang Politik Uang

Penelitian ini mengungkap kompleksitas yang menarik dalam interpretasi dan praktik politik uang di Tana Toraja, yang berakar pada tradisi budaya lokal. Temuan ini menyoroti perbedaan persepsi yang signifikan antara masyarakat lokal dan penyelenggara pemilu mengenai apa yang dianggap sebagai politik uang, terutama dalam konteks praktik adat *Passolo*.

Passolo, yang secara harfiah berarti "sumbangan" atau "pemberian", adalah praktik adat yang mengakar kuat dalam budaya Toraja. Tradisi ini melibatkan pemberian sumbangan atau bantuan dalam berbagai acara adat, seperti upacara pernikahan, pemakaman, atau

Nama Penulis: Febrianto Syam, Novayanti Sophia Rukmana

Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja

perayaan komunal lainnya. Dalam konteks sosial Toraja, *Passolo* bukan sekadar transaksi material, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai komunal, solidaritas, dan kewajiban sosial.

Namun, dalam konteks politik elektoral, praktik *Passolo* menjadi area abu-abu yang problematik. Kandidat politik seringkali mengadopsi praktik ini sebagai bagian dari strategi kampanye mereka, memberikan sumbangan kepada keluarga atau komunitas tertentu. Dari perspektif kandidat dan sebagian masyarakat lokal, tindakan ini dianggap sebagai pemenuhan kewajiban adat dan bentuk partisipasi dalam kehidupan komunal. Namun, dari sudut pandang penyelenggara pemilu dan standar integritas pemilu universal, praktik ini berpotensi diklasifikasikan sebagai bentuk politik uang.

Pernyataan aktivis pemilu yang dikutip dalam temuan penelitian menggambarkan dengan jelas dilema ini:

“Sulit untuk membedakan antara *Passolo* yang merupakan bagian dari tradisi dan politik uang. Kandidat sering berargumen bahwa mereka hanya menjalankan kewajiban adat, bukan membeli suara.”

Pernyataan ini mengungkapkan beberapa aspek penting:

1. Ambiguitas Moral: Terdapat zona abu-abu antara praktik adat yang diterima dan perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran integritas pemilu.
2. Manipulasi Tradisi: Ada potensi bahwa kandidat politik memanipulasi praktik adat untuk kepentingan elektoral mereka.
3. Tantangan Penegakan: Penyelenggara pemilu menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan anti-politik uang tanpa dianggap melanggar norma budaya lokal.
4. Persepsi yang Berbeda: Masyarakat lokal dan penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang konstitusi perilaku yang tepat dan etis dalam konteks kampanye politik.

Fenomena ini sejalan dengan konsep "ekonomi moral" yang dikemukakan oleh James C. Scott (1976) dalam karyanya yang berpengaruh, "The Moral Economy of the Peasant". Scott berpendapat bahwa dalam masyarakat tradisional, terutama di kalangan petani Asia Tenggara, terdapat sistem nilai dan ekspektasi tentang kewajiban timbal balik antara elit dan masyarakat umum. Konsep ini menyediakan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika *Passolo* dalam politik Toraja:

1. Kewajiban Timbal Balik: Dalam ekonomi moral, elit (dalam hal ini, kandidat politik) diharapkan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai balasannya, masyarakat memberikan dukungan dan kesetiaan.
2. Legitimasi Sosial: Pemberian *Passolo* oleh kandidat dapat dilihat sebagai cara untuk membangun dan mempertahankan legitimasi sosial, bukan hanya sebagai transaksi politik.
3. Etika Subsistensi: Scott menekankan bahwa dalam masyarakat tradisional, ada etika yang mengutamakan keamanan subsistensi kolektif. Praktik *Passolo* dalam konteks politik mungkin dipandang sebagai bagian dari jaring pengaman sosial ini.
4. Resistensi terhadap Perubahan: Ekonomi moral dapat menjelaskan mengapa masyarakat lokal mungkin resisten terhadap interpretasi *Passolo* sebagai bentuk politik uang, karena hal ini menantang pemahaman tradisional mereka tentang hubungan sosial-politik.

Lebih lanjut, fenomena ini juga dapat dianalisis melalui lensa teori clientelisme politik. Aspinall dan Sukmajati (2016) dalam studi mereka tentang politik uang di Indonesia, menunjukkan bagaimana praktik-praktik seperti *Passolo* dapat menjadi bagian dari jaringan patronase politik yang kompleks. Dalam konteks ini, pemberian materi tidak selalu dipandang

sebagai "pembelian suara" yang eksplisit, tetapi lebih sebagai bentuk pertukaran sosial yang membangun dan mempertahankan hubungan patron-klien jangka panjang.

Implikasi dari fenomena ini sangat luas:

1. Tantangan Regulasi: Pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu menghadapi tugas sulit dalam merancang dan menegakkan regulasi yang dapat membedakan antara praktik adat yang sah dan politik uang.
2. Pendidikan Pemilih: Ada kebutuhan untuk program pendidikan pemilih yang sensitif terhadap budaya, yang dapat menjelaskan konsep integritas pemilu dalam konteks nilai-nilai lokal.
3. Reformasi Kampanye: Perlu dipikirkan bentuk-bentuk kampanye politik yang dapat mengakomodasi nilai-nilai tradisional sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu.
4. Penelitian Lanjutan: Diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami bagaimana praktik seperti *Passolo* mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu dalam jangka panjang.
5. Dialog Antar-Budaya: Fenomena ini menunjukkan pentingnya dialog berkelanjutan antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat lokal untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang integritas pemilu yang kontekstual.

Kesimpulannya, kasus *Passolo* di Tana Toraja mengilustrasikan kompleksitas dalam menerapkan standar integritas pemilu universal di daerah dengan praktik budaya yang kuat. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bernuansa dan kontekstual dalam manajemen pemilu, yang dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi elektoral.

3. Strategi Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Tantangan

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penyelenggara pemilu di Tana Toraja telah menerapkan beberapa strategi:

3.1. Pendekatan Kultural dalam Sosialisasi Pemilu

Bawaslu dan KPU Tana Toraja telah berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam sosialisasi pemilu. Misalnya, mereka melibatkan tokoh-tokoh adat dalam kampanye anti politik uang. Seorang pejabat KPU menjelaskan, "Kami menggunakan istilah-istilah lokal dan analogi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja untuk menjelaskan konsep integritas pemilu. Ini membuat pesan kami lebih mudah diterima." Pendekatan ini sejalan dengan konsep "vernakularisasi demokrasi" yang dikemukakan oleh Michelutti (2007), di mana nilai-nilai dan praktik demokrasi diterjemahkan ke dalam konteks budaya lokal untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitasnya.

3.2. Kolaborasi dengan Lembaga Adat

Penyelenggara pemilu menjalin kerjasama dengan lembaga adat untuk membantu verifikasi status pemilih, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan praktik adat. Strategi ini mencerminkan pendekatan "hibridisasi kelembagaan" yang dijelaskan oleh Boege et al. (2009), di mana institusi formal negara berkolaborasi dengan struktur tradisional untuk meningkatkan efektivitas tata kelola.

Nama Penulis: Febrianto Syam, Novayanti Sophia Rukmana

Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja

Temuan penelitian di Tana Toraja memberikan wawasan yang kaya dan kompleks tentang pelaksanaan pemilu di daerah dengan tradisi adat yang kuat. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, kita dapat menggunakan kerangka konseptual integritas pemilu yang dikembangkan oleh Norris (2014) sebagai titik awal analisis. Norris mengidentifikasi beberapa dimensi kunci integritas pemilu, termasuk hukum pemilu, prosedur pemilu, dan pendaftaran pemilih. Namun, kasus Tana Toraja menunjukkan bahwa dimensi-dimensi ini tidak bisa dilihat sebagai entitas yang terpisah dari konteks budaya lokal. Sebaliknya, mereka saling terkait erat dan dibentuk oleh nilai-nilai dan praktik adat setempat. Hal ini sejalan dengan argumen Klingemann (2014) yang menekankan pentingnya memahami demokrasi dalam konteks budaya lokal.

Praktik penundaan pencatatan kematian di Tana Toraja menyajikan contoh yang menarik tentang bagaimana adat istiadat lokal dapat berbenturan dengan prosedur pemilu standar. Ritual *Rambu Solo'*, yang menunda pengakuan resmi kematian seseorang hingga upacara adat selesai dilaksanakan, menciptakan dilema dalam pengelolaan daftar pemilih. Situasi ini menantang asumsi dasar tentang bagaimana identitas dan status seseorang didefinisikan dalam konteks pemilu. Fenomena ini sejalan dengan konsep "kematian bertahap" yang dijelaskan oleh Tsintjilonis (2000) dalam studinya tentang ritual kematian di Toraja.

Schaffer (2007) menawarkan wawasan berharga dalam menghadapi dilema semacam ini. Ia berpendapat bahwa implementasi standar universal integritas pemilu perlu mempertimbangkan variasi lokal. Argumen ini mengajak kita untuk mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap manajemen pemilu, yang menghormati nilai-nilai lokal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar integritas pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "demokrasi kontekstual" yang diusulkan oleh Burnell (2013).

Persepsi yang beragam tentang politik uang di Tana Toraja juga menyoroti kompleksitas dalam menerapkan standar integritas pemilu di daerah dengan tradisi adat yang kuat. Hicken (2011) menegaskan bahwa praktik klientelisme dalam politik elektoral seringkali berakar pada norma-norma sosial dan budaya yang telah lama ada. Dalam kasus Tana Toraja, praktik pemberian Passolo (sumbangan) dalam berbagai acara adat yang diadopsi oleh kandidat dalam kampanye politik mencerminkan kompleksitas ini. Fenomena ini sejalan dengan argumen Aspinall (2014) tentang "politik uang" dalam konteks Indonesia yang seringkali terkait erat dengan praktik-praktik sosial yang sudah mengakar.

Strategi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu di Tana Toraja, seperti pendekatan kultural dalam sosialisasi dan kolaborasi dengan lembaga adat, sejalan dengan konsep "demokrasi vernakular" yang diperkenalkan oleh Paley (2002). Konsep ini mengajak kita untuk memahami bagaimana ide-ide dan praktik demokrasi diterjemahkan dan diadaptasi dalam konteks lokal. Michelutti (2007) lebih lanjut mengembangkan konsep ini, menunjukkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat "divernakularisasi" atau diterjemahkan ke dalam bahasa dan praktik lokal.

Pendekatan "demokrasi vernakular" ini memiliki implikasi penting untuk teori dan praktik demokrasi. Ia menantang asumsi bahwa ada satu model demokrasi universal yang dapat diterapkan di semua konteks, sejalan dengan kritik yang diajukan oleh Schmitter dan Karl (1991) terhadap pendekatan "one size fits all" dalam demokratisasi.

Kasus Tana Toraja juga menyoroti pentingnya memahami demokrasi dan integritas pemilu sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Hal ini sejalan dengan argumen Beetham (1994) yang melihat demokrasi sebagai proses yang terus-menerus, bukan sebagai kondisi yang statis.

Boege et al. (2009) mengusulkan konsep "hibridisasi kelembagaan", di mana institusi formal negara berkolaborasi dengan struktur tradisional untuk meningkatkan efektivitas tata kelola. Dalam konteks pemilu, ini mungkin berarti mengembangkan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang melibatkan baik otoritas pemilu formal maupun lembaga adat.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep "tata kelola hibrida" yang dibahas oleh Mac Ginty (2010) dalam konteks pembangunan perdamaian.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas yang melekat dalam pelaksanaan pemilu di daerah dengan tradisi adat yang kuat, menggunakan Tana Toraja sebagai studi kasus. Temuan utama penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting:

1. Praktik adat memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas pemilu, terutama dalam hal akurasi daftar pemilih dan persepsi tentang politik uang. Ritual *Rambu Solo'* dan konsep kematian bertahap dalam budaya Toraja, misalnya, menciptakan tantangan unik dalam pengelolaan daftar pemilih.
2. Persepsi dan praktik politik uang di Tana Toraja seringkali berakar pada tradisi adat seperti pemberian Passolo, menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai pelanggaran dalam standar universal pemilu mungkin memiliki interpretasi berbeda dalam konteks lokal.
3. Penyelenggara pemilu di Tana Toraja telah mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan peka budaya, termasuk kolaborasi dengan lembaga adat dan penggunaan pendekatan kultural dalam sosialisasi pemilu.

Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman kita tentang integritas pemilu dengan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya lokal. Ini mendukung argumen untuk pendekatan yang lebih bernuansa dalam studi demokrasi elektoral, sejalan dengan konsep "demokrasi vernakular" (Paley, 2002) dan "hibridisasi kelembagaan" (Boege et al., 2009).

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan integritas pemilu di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Penyelenggara pemilu perlu mengembangkan strategi yang dapat menjembatani gap antara standar universal integritas pemilu dengan realitas lokal, mungkin melalui kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat.

Meskipun penelitian ini berfokus pada Tana Toraja, implikasinya dapat relevan untuk daerah-daerah lain dengan karakteristik budaya yang kuat. Namun, perlu dicatat bahwa sebagai studi kasus tunggal, generalisasi temuan harus dilakukan dengan hati-hati.

Untuk penelitian masa depan, beberapa arah yang menjanjikan termasuk:

1. Studi komparatif yang melibatkan beberapa daerah dengan karakteristik budaya yang berbeda untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi dalam interaksi antara praktik adat dan integritas pemilu.
2. Penelitian longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari strategi adaptif yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu.
3. Eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana konsep "hibridisasi kelembagaan" dapat diterapkan dalam manajemen pemilu di daerah-daerah dengan tradisi adat yang kuat.
4. Investigasi mendalam tentang persepsi masyarakat lokal terhadap integritas pemilu dan bagaimana persepsi ini dibentuk oleh nilai-nilai budaya.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa upaya meningkatkan integritas pemilu di daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang kuat memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Ini melibatkan tidak hanya adaptasi prosedur teknis, tetapi juga dialog yang berkelanjutan antara nilai-nilai demokrasi universal dan praktik-praktik budaya lokal. Hanya

Nama Penulis: Febrianto Syam, Novayanti Sophia Rukmana

Tantangan Integritas Pemilu Daerah Adat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja

dengan pendekatan semacam ini, kita dapat berharap untuk mengembangkan sistem pemilu yang tidak hanya memenuhi standar integritas internasional, tetapi juga berakar kuat dalam realitas sosial dan budaya setempat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Beetham, D. (1994). *Defining and Measuring Democracy*. London: SAGE Publications.
- Bjornlund, E. C. (2004). *Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289-310.
- Hugo, G. (1982). Circular Migration in Indonesia. *Population and Development Review*, 8(1), 59-83.
- Klingemann, H. D. (2014). Dissatisfied Democrats: Democratic Maturation in Old and New Democracies. In R. J. Dalton & C. Welzel (Eds.), *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens* (pp. 116-157). New York: Cambridge University Press.
- Mac Ginty, R. (2010). Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace. *Security Dialogue*, 41(4), 391-412.
- Michelutti, L. (2007). The Vernacularization of Democracy: Political Participation and Popular Politics in North India. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 13(3), 639-656.
- Mitzner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party Systems of the 1950s and the Post-Soeharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-Party Competition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(3), 431-453.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.
- Paley, J. (2002). Toward an Anthropology of Democracy. *Annual Review of Anthropology*, 31, 469-496.
- Schaffer, F. C. (Ed.). (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is... and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88.
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.



Tsintjilonis, D. (2000). Death and the Sacrifice of Signs: 'Measuring' the Dead in Tana Toraja. *Oceania*, 71(1), 1-17.

Vel, J. A. C. (2005). Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in a New Democratic Setting. *Indonesia*, 80, 81-107.

BUKU REFERENSI

Beetham, D. (1994). Defining and measuring democracy.

Bjornlund, E. C. (2004). Beyond free and fair: Monitoring elections and building democracy.

Boege, V., Brown, A., Clements, K., & Nolan, A. (2009). Building peace and political community in hybrid political orders.

Burnell, P. (2013). Promoting democracy abroad: Policy and performance.

Dahrendorf. (1992). Kematian Sosialisme di Eropa (Terjemahan Edi Soetisna).

Effendi, S. (1982). Unsur-unsur Penelitian Ilmiah. In M. S. (Ed), *Metode Penelitian Survei*.

Ibrahim, N. W. (2018). *Ekonomi Politik Sumber Daya Timah* (Kronik Bangka Belitung).

Klingemann, H. D. (2014). Dissatisfied democrats: Democratic maturation in old and new democracies.

Mac Ginty, R. (2010). Hybrid peace: The interaction between top-down and bottom-up peace.

Schaffer, F. C. (2007). Elections for sale: The causes and consequences of vote buying.

Schulte Nordholt, H., & van Klinken, G. (Eds.). (2007). *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia*.

Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*.

Sumber Online:

White, H. (2007, Maret 2007 27). Problem-based Learning in Introductory Science Across Disciplines. Retrieved Oktober 17, 2019, from Udel.edu: <http://www.udel.edu/chem/white/finalrpt.html>.